

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wikanto, F. S. (2025, July 4). *Peminjam Fintech Harus Lolos SLIK/BI Checking, Cek Daftar Pinjol Resmi OJK Juli 2025*.
- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Afif, Z., Manasar, A., Try, D., Hutabarat, H., Azura, D., & Kunci, K. (2024). EX-OFFICIO LAW REVIEW Pemberantasan Pencucian Uang: Tinjauan Peran PPATK dalam Kasus Robot Trading Indra Kesuma ARTICLE INFO ABSTRACT. *Law Review* |, 3(3), 262–271. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>
- Agustinus Yoga Primantoro. (2025, September 17). *Kepentingan Politik Berisiko Obok-obok BI dan Otoritas Keuangan Lain*.
- Agustinus Yoga Primantoro. (2026, April 7). *DPR Pertimbangkan Penghapusan Pungutan OJK*.
- Akttausyaniah, N., & Hidayat, R. M. (n.d.). *Pengaruh FinTech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah)*. <https://www.bps.go.id/>
- Annisa, F., & Resi Putri, P. (n.d.). *Penerapan Program APU PPT Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri FinTech*.
- Arfah, A., Alam, S., & Muslim Indonesia, U. (2024). *Halaman | 180 Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur*. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>
- Arkan, A. N., Galih Aditya, R., Raharjo, F. C., Hidayatullah, R. S., Wijianarko, B., & Mahendra, R. (2024). Analisis Kepercayaan Dan Kemudahan Bertransaksi Mahasiswa Ums Terhadap Minat Penggunaan Produk Financial Technology (Fintech). In *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 2, Issue 1). <https://jsr.lib.ums.ac.id/index.php/determinasi•page124>
- Asmawi. (n.d.). *Aplikasi Masalah Dalam Kriminalisasi Pencucian Uang*.

- Astuti, R. P., Syahda Kamila, N., Holida, N., Agustin, M., Kiai, U., Achmad, H., & Jember, S. (2024). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 130–140. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). UU 21 Tahun 2011. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39257/Uu-No-21-Tahun-2011>.
- Bank Indonesia. (2021). *PBI_230621*.
- Bank Indonesia. (n.d.). *BI-FAST: Layanan Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional*.
- Bappebti. (2024). *edaran_kepala_bappebti_2024_12_17_epbgela5_id*.
- BPK RI. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank*.
- BPK. (2010). *UU-No-8-tahun-2010*.
- BPK. (2024). *PBI_102024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313425/peraturan-bi-no-10-tahun-2024>
- Bunga Ichwanda Solikha, & Anas Firman Adi. (2025). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(2), 169–179. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v5i2.5516>
- Daley, A., & Christiawan, R. (2024). Analisis Perkembangan Regulasi FinTech Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Per;indungan Konsumen. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7, Issue 7).
- Dany Saputra. (2025, October 1). *Draf RUU P2SK Terbaru: DPR Bisa Evaluasi Kinerja OJK, LPS, hingga BI Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Draf RUU P2SK Terbaru: DPR Bisa Evaluasi Kinerja OJK, LPS, hingga BI.”*
- Darmidiharjo, D. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*.
- Departemen Komunikasi. (2019, August 21). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*.

- Dhar, V., & Stein, R. M. (2017). Economic and business dimensions: FinTech platforms and strategy. In *Communications of the ACM* (Vol. 60, Issue 10, pp. 32–35). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3132726>
- Diaz Rasendriya, R., & Fitriadi Azhari, A. (2023). *The Effectiveness Of The Principle Of Consumer Recognition From Bank In Preventing The Crime Of Money Laundering* (Vol. 2, Issue 2).
- Dm, R., & Penelitian, A. (2025). Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>
- Dwi Pratiwi, E. (2024). *Pengaruh Digital Banking, FinTech Payment, Dan FinTech Lending Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Tahun 2018-2022 (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan)*.
- Ekonomi dan Bisnis, F. (n.d.). *Digitalisasi Sistem Pembayaran Dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia*.
- Eliana Zahra Devina. (2025, September 11). *Usai Peralihan Aset Digital, Bappebti Perkuat Perdagangan Komoditas*.
- Fachrurrazy, M., Dirah, :, & Siliwadi, N. (2020). *Regulasi Dan Pengawasan FinTech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- FATF. (2023). *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proloferation*.
- Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. W. (2025a). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 4(1), 21–30. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153>
- Firyalfatin. (2026, February 27). *Praktik APU-PPT Tak Bisa Hitam-Putih, Lembaga Keuangan Harus Utamakan Monitoring*.
- Gilang Rifai, A., Faslah, R., Ekonomi, F., & Maulana Malik Ibrahim Malang, U. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam: Analisis Teoretis Dan Studi Kasus Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

- Ginanjari Hasanudin, Jajang Nurjaman, & Dadang Husen Sobana. (2025). Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(1), 203–218. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.809>
- Gotman Tambunan, [], Pakpahan, K., Nikodemus, [], Manik, A., Timothy, [], Situmorang, P., & Refleksi penegakan hukum dan keadilan, J. (. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Industri FinTech. In *Jurnal Ius Civile* | (Vol. 313, Issue 2). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>
- Hasanudin, G., Nurjaman, J., Sobana, D. H., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. (2025). Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.809>
- Hukum Online. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia*. <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2023/07/Undang-Undang-No.27-Tahun-2022-Hukumonline.pdf>
- Hukum Online. (2026, February 27). *Praktik APU-PPT Tak Bisa Hitam-Putih, Lembaga Keuangan Harus Utamakan Monitoring*.
- info publik. (2025, November 29). *Tiga Lembaga Perkuat Integritas dan Keamanan Sektor Jasa Keuangan*.
- infobanknews. (2025, June 13). *Rudiantara Sentil Regulasi yang Terlalu Ketat dalam Mengawasi Pindar*.
- jdihkemenkeu.id. (2023). *UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Kartika Putri, A. H. S. H., LL.M. (2024). *Perlindungan Hukum Korban Pencucian Uang (Studi Kasus Afiliator Binomo)*.
- Kelsen, H. (1945). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum dan Negara*. www.mahkamahkonstitusi.go.id
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*.

Kezia Manorek, M., Gracia, O. I., & Nachrawy, N. (n.d.). *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Khairul, Siregar, M., & Marlina. (n.d.). *Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Kompas.co. (2023, August 21). *Jatuhi Denda, Menkominfo Sebut Beberapa Oknum Bank Jual Data Pribadi Nasabah*.

Kusuma, H., Wiwiek, D., & Asmoro, K. (n.d.). *Perkembangan Financial Technology (FinTech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*.

Lestari, Z., Munisa, N., Artika, S., Damanik, M., Dwi Navita, S., al Arhab, Y., & Damanik, B. E. (2025). Perkembangan FinTech Di Indonesia : Tantangan dan Peluang Bagi Lembaga Keuangan. *Jurnal Inovasi Artificial Intelligence & Komputasional Nusantara (JIKOMNUS)*, 3(1).

Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 905–918. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.4626>

Maraknya Penipuan, Satgas PASTI Hentikan Ribuan Entitas Keuangan Ilegal. (2024, June 26).

Marini, M., Linawati, L., & Putra, R. E. (2020). Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i2.y2020.p91-104>

METODE PENELITIAN HUKUM. (n.d.).

Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). FinTech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1). <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>

Mukhammad Maulana Fajri. (2024, December 28). *Peralihan Pengawasan Derivatif Keuangan ke OJK dan BI Berjalan Lancar*.

’Nurjaman, I. dan ’Prayuti, Y. (2025). *Celah Regulasi Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Pencucian Uang Dari Kejahatan Ekonomi Melalui Aset Digital Di Indonesia*.

- Nabila¹, Z. Y., Simbolon², A. F., Putri, K., Simaremare³, A., Nababan⁴, R., Maghfiroh⁵, W., & Damanik⁶, B. E. (2025). Regulasi Fintech : Tantangan dalam Mengatur Inovasi Teknologi Keuangan di Indonesia. In *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Aplikasi Komputer (JRSIKOM)* (Vol. 1, Issue 2).
- Ni Luh Anggela. (2025, December 21). *Sederet Fakta Soal Peretasan Rp200 Miliar Via BI Fast, Apa Langkah OJK?* .
- Njatrijani, R. (n.d.). *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia*.
- Nursukma, D. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Good Corporate Governance Terhadap Financial Technology D Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 87–99. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.496>
- OJK. (2022a). *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf>
- OJK. (2022b, September 20). *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*.
- OJK. (2024, August 9). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028*.
- OJK. (2025a). *POJK 27 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto AKD AK*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK/POJK%2027%20Tahun%202024%20Penyelenggaraan%20Perdagangan%20Aset%20Keuangan%20Digital%20Termasuk%20Aset%20Kripto%20AKD%20AK.pdf>
- OJK. (2025b). *SP-204 OJK, PPATK, dan BSSN Sepakati Sinergi Penguatan Integritas dan Keamanan Sektor Jasa Keuangan*.
- OJK. (2025c, December). *Statistik LPBBTI Desember 2025*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *POJK 8-2023 - APU PPT dan PPPSPM di SJK (1)*. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/pojk/Documents/POJK%208-2023%20-%20APU%20PPT%20dan%20PPPSPM%20di%20SJK.pdf>
- Otto Michiel Jan. (2018). *Real Legal Certainty And Its Relevance*.
- Persaulian, B. (n.d.). *Regulasi Teknologi Financial (FinTech) Di Indonesia Regulation Of Financial Technology (FinTech) In Indonesia*.
- Philipus, M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.
- Pidana, H., & Nurjaman dan Yuyut Prayuti, I. (2025). Digital Di Indonesia Regulatory Gaps In Law Enforcement In Combating Money Laundering From Economic Crimes Through Digital Assets In Indonesia. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Issue 7). <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- PPATK. (2024, December 17). *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2025-2029*.
- PPATK. (2025, March 26). *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*.
- Prayuti, Y., Lany, A., Hikmah, W. N., Puspitasari, A. A., Novita, N. A., & Kusriani, N. (2025). Dynamics of Consumer Protection Law In the Development of the Financial Technology Industry in Indonesia. *Law and Justice*, 10(1), 67–86. <https://doi.org/10.23917/laj.v10i1.4804>
- Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>
- Puspa Dewi, R. (2023). *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*.
- Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>
- Rahma STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Jl Alue Peunyareng, I., Kleng, G., & Meureubo, K. (2022). *Ida Rahma Penegakkan Hukum Tindak Pidana*

Pencucian Uang (Vol. 17, Issue 2).
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

Rahmadani Harianja, L., & Naser Daulay, A. (2024). Systematic Literatur Riview : Analisis Transformasi Digital Industri Asuransi Potensi (InsurTech) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(02).

Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 39.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>

Rochmawati, D., & Ali Hisyam, M. (2023). Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Praktik Financial Technology (FinTech) Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah. In *Jurnal Kaffa* (Vol. 2, Issue 1).

Saputra, S., Komala, R., Ayu, R., & Aryani, I. (2023). Financial Technology, Profitabilitas dan Efisiensi Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(2).
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>

Satjipto Rahardjo. (1982). *ILMU HUKUM*.

Sebastian Laowo, Y. (2022). *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Senjaya, O., Fakultas Hukum, M. H., Karawang, S., Ronggowaluyo, J. H. S., Jambe, T., & Karawang, T. (n.d.). *Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
<http://nasional.kompas.com>

Setiawati, D., Maharani, C., Kurniasih, L., & Afdah, A. H. (2022). Perlindungan Hukum Fintech Leading Illegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(4), 19–23. <https://doi.org/10.31603/7961>

Silalahi, A., & Hermansyah, E. O. (2025). *Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal*. 11(2), 233–250. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4650>

Silvi Rohmawati, N., & Rosyada, M. (n.d.). *Penggunaan FinTech Syariah Dan Investasi Online Dalam Tinjauan Teori Kepercayaan Dan Risiko*.

- Suci Rahayu, L., Riska Musa, D. A., & Fandra Mahira, D. (n.d.). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina*.
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (n.d.). *Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital*.
- Syauket, A., Hutagalung, J. M., & Prastio, M. A. (2023). Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 27–40. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1970>
- Tambunan Gotman, P. K. M. A. N. S. P. T. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Industri FinTech*.
- Tempo. (2022, February 26). *Rekam Jejak Indra Kenz, Crazy Rich yang Jadi Tersangka dalam Kasus Binomo*.
- Tim detikcom. (2022a, November 15). *Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*.
- Tim detikcom. (2022b, November 15). *Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara Baca artikel detiknews, “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara”*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-6406725/Jejak-Kasus-Indra-Kenz-Berujung-Vonis-10-Tahun-Bui-Dan-Aset-Dirampas-Negara>.
- Tim Redaksi, C. I. (2024, December 1). *Daftar Lengkap 98 Pinjol Resmi yang Terdaftar di OJK Baca artikel CNBC Indonesia “Daftar Lengkap 98 Pinjol Resmi yang Terdaftar di OJK” selengkapnya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/market/20241201171725-17-592498/daftar-lengkap-98-pinjol-resmi-yang-terdaftar-di-ojk Download Apps CNBC Indonesia sekarang https://app.cnbcindonesia.com/*.
- Ula Ulya, N., & Akmal Musyarri, F. (n.d.-a). *Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. <https://tirto.id/>
- Wulandari, H. A., Astuti, R. P., Barokah, M., Syariah, P., Kiai, U., Ahmad, H., & Jember, S. (n.d.). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Jurnal*

Penelitian Nusantara, I, 113–120.
<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.240>

- Yani, M. A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Journal WIDYA Yustisia*, 20. www.laundryman.u-net.com
- Yusoff, Y. H., Oktaviani, Y. R., Handayani, S., Safwan Ismail, M., Hashim, M. R., & Tapsir, R. (2023). Money Laundering Prevention through Regulatory Technology and Internal Audit Function in Indonesia Banking Sector. *Accounting and Finance Research*, 12(4), 62. <https://doi.org/10.5430/afr.v12n4p62>
- Zenia Iswandari, N. K., Kyra Trisno, A., & Ayu Apsari Hadi, I. G. (2025). Cryptocurrency-Based Money Laundering: Legal Gaps and New Threats in the Digital Financial World. *SHS Web of Conferences*, 221, 03008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103008>